



Analisis Kebijakan Meso Uji Kelayakan Pembangunan Jalan Lingkar Utara Lamongan

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Amma Fathuurrahmaan Universitas Sriwijaya Amma.Fathuurrahmaan@fisip.unsri.ac.id +6282232892235	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Fathuurrahmaan, A. (2025). Analisis Kebijakan Meso Uji Kelayakan Pembangunan Jalan Lingkar Utara Lamongan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3),4563-4574.

Abstrak

Penelitian ini berjudul Analisis Meso Kebijakan Uji Kelayakan Pembangunan Jalan Lingkar Utama Lamongan. Latar belakang penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemacetan yang diakibatkan oleh padatnya mobilitas masyarakat di Jalan Pamglima Sudirman dan Jalan Jaksa Agung Suprpto Kabupaten Lamongan yang kebetulan dilintasi oleh dua jalur kereta api, membuat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan terobosan kemacetan dengan membangun Jalan Lintas Utara Lamongan. Ketika kebijakan pembangunan jalan lintas utara memasuki uji kelayakan, banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang membuat masyarakat setempat menuntut penutupan uji kelayakan jalan tersebut. Fokus penelitian ini adalah mengkaji bagaimana kebijakan uji kelayakan jalan dianalisis melalui kajian teori kebijakan transportasi dan analisis meso kebijakan publik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan transportasi menurut Ofyar Tarmin dan William Dunn serta teori analisis meso melalui pendekatan konstruktivis dalam kebijakan publik menurut pemikiran Wayne Parsons, Herbert Blummer, dan Mauss. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka dengan menggunakan studi naratif dengan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan data berita pada website dan berita media sosial warga Lamongan. Temuan data penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan Jalan Lintas Utara Lamongan merupakan wujud dari kebijakan Perhubungan dan telah dilakukan uji coba kelayakan jalan yang masih banyak kekurangannya. Temuan selanjutnya dalam penelitian ini adalah para aktor pembuat dan pelaksana kebijakan berusaha memahami bagaimana opini publik dan media massa berinteraksi dengan para pembuat kebijakan untuk menentukan agenda dan permasalahan perbaikan pembangunan Jalan Lintas Utara Lamongan. Selain itu, respon terhadap penutupan Jalan Lintas Utara Lamongan dan penambahan lampu lalu lintas merupakan wujud dari pendekatan konstruktivisme dimana perbaikan kebijakan dilakukan melalui konstruktivisme masyarakat dalam media sosial dimana menurut Blummer permasalahan tersebut bukan hanya realitas objektif tetapi juga merupakan produk opini kolektif dimana permasalahan perlunya Jalan Lintas Utara Lamongan ditingkatkan terbentuk dalam pembentukan perspektif dan didefinisikan dalam masyarakat melalui opini mereka di media sosial. Selain itu, permasalahan sosial masyarakat Balun yang memblokir Jalan Lintas Utara Lamongan untuk sementara waktu guna perbaikan merupakan salah satu bentuk elemen analisis meso mengenai proses perbaikan kebijakan melalui keberadaan gerakan sosial yang dimunculkan oleh perilaku publik masyarakat setempat, kelompok kepentingan, maupun kelompok penekan.

Kata Kunci: Kebijakan Jalan Lintas Utara Lamongan, Kebijakan Transportasi, Analisis Kebijakan Publik Meso

Abstract

This research is entitled Meso Analysis of the Policy of Feasibility Testing of the Construction of the Lamongan Main Ring Road. The background of this research is that it is motivated by the congestion caused by the density of public mobility on Jalan Pamglima Sudirman and Jalan Jaksa Agung Suprpto, Lamongan Regency, which happens to be crossed by two railway tracks, making the Central Government and the Lamongan Regency Government make a breakthrough in congestion by building the Lamongan North Cross Road. When the policy of building the northern cross road entered the feasibility trial, there were many traffic accidents that made the local community demand the closure of the road feasibility trial. The focus of this research is to examine how the road feasibility trial policy is analyzed through the study of transportation policy theory and public policy meso analysis. The theory used in this research is the transportation policy theory according to Ofyar Tarmin and William Dunn and the meso analysis theory through a constructivist approach in public policy according to the thoughts of Wayne Parsons, Herbert Blummer, and Mauss. The research method used in this research is the literature study method using narrative studies with data collection techniques through collecting news data on websites and social media news of Lamongan residents. The findings of this research data indicate that the policy of developing the Lamongan North Cross Road is a manifestation of the Transportation policy and has been carried out roadworthiness trials that still have many shortcomings. The next finding in this study is that the actors who make and implement policies are trying to understand how public opinion and the mass media interact with policy makers to determine the agenda and problems of improving the construction of the Lamongan North Cross Road. In addition, the response to the closure of the Lamongan North Cross Road and the addition of traffic lights is a manifestation of the constructivist approach where policy improvement is carried out through community constructivism in social media where according to Blummer, the problem is not only an objective reality but also a product of collective opinion where the problem of the need for the Lamongan North Cross Road to be improved is formed in the formation of perspectives and defined in society through their opinions on social media. In addition, the social problem of the Balun community coming to blockade the Lamongan North Cross Road to be temporarily closed for repairs is a form of one of the meso analysis elements regarding the process of policy improvement through the existence of social movements generated by the public behavior of local communities, interest groups or pressure groups.

Keywords: Lamongan North Cross Road Policy, Transportation Policy, Meso Public Policy Analysis

A. Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman, dinamika ruang publik terus memunculkan fenomena-fenomena menarik. Fenomena-fenomena ini tentu menjadi isu publik yang menuntut pemerintah untuk segera mengatasinya agar masyarakat dapat memanfaatkan ruang publik untuk beraktivitas. Salah satu isu yang muncul dari dinamika ini adalah kemacetan lalu lintas, akibat ketidakmampuan jalan untuk menampung banyaknya kendaraan yang melintas setiap harinya.

Kemacetan lalu lintas, yang dihadapi pemerintah dan masyarakat, masih menjadi isu serius yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Permasalahan ini muncul di wilayah-wilayah dengan aktivitas ekonomi yang tinggi maupun di jalan nasional dengan volume lalu lintas yang tinggi dan padat. Di tengah meningkatnya pertumbuhan penduduk dan volume kendaraan, kebutuhan akan sarana transportasi, seperti pelebaran jalan atau pembangunan jalan baru, untuk mengurangi kemacetan menjadi semakin mendesak. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan yang terus-menerus tidak diimbangi dengan pembangunan jaringan jalan yang memadai. Permasalahan ini kemudian memberikan tekanan pada infrastruktur transportasi yang sudah ada namun kelebihan kapasitas, seperti jalan nasional yang menghubungkan wilayah-wilayah di tingkat provinsi dan kabupaten.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2004), jumlah kendaraan bermotor meningkat rata-rata 6,4% per tahun selama kurun waktu 2018-2023.

Sebaliknya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), jumlah jalan nasional hanya tumbuh sekitar 1,8% per tahun. Berdasarkan data tersebut, terdapat ketidakseimbangan antara kebutuhan sarana transportasi dengan kapasitas infrastruktur yang dibangun. Hal ini terlihat dari tingginya peningkatan volume kendaraan di jalan nasional, terutama di beberapa kawasan yang memiliki peran strategis. Salah satu peran strategis yang dimaksud adalah kawasan jalan nasional yang terletak di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.

Lamongan, sebagai sebuah kabupaten di Jawa Timur, terletak di sepanjang jalur utama utara Pulau Jawa. Sebagai sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan secara geografis terletak di jalur utama utara Pulau Jawa (Pantura), menghubungkan kota-kota besar seperti Kabupaten Surabaya, Gresik, Tuban, dan Bojonegoro, serta merupakan kabupaten yang menghubungkan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Letak geografis Kabupaten Lamongan yang unik menjadikannya jalur transit penting bagi distribusi ekonomi dan mobilitas manusia, termasuk perdagangan, industri, logistik nasional, dan pekerjaan antarkota. Namun, seiring waktu, intensitas lalu lintas yang tinggi di jalan-jalan utama Lamongan seringkali menyebabkan kemacetan kronis, terutama di beberapa kawasan ramai di Babat, Sukodadi, dan Kota Lamongan.

Data yang dirilis Kementerian Perhubungan (2024) menunjukkan bahwa kepadatan lalu lintas di Jalan Raya Nasional Lamongan secara konsisten meningkat sekitar 15-20% setiap tahunnya. Kemacetan ini terjadi setiap hari pada jam sibuk, bahkan hingga malam hari. Hal ini diperparah dengan tingginya volume kendaraan berat seperti truk dan kontainer berat yang melintasi jalan Sudirman dimana terdapat dua perlintasan kereta api yang jaraknya kurang dari 2 kilometer, dimana jalan tersebut masih berupa dua jalur sehingga jalan tersebut tidak mampu menampung arus mobilitas kendaraan yang semakin padat.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, volume kendaraan yang melintasi wilayah perkotaan Kabupaten Lamongan meningkat selama musim hujan. Kemacetan di sepanjang Jalan Jaksa Agung Suprpto memanjang hingga beberapa kilometer.



Kondisi perlintasan kereta api yang melintasi Jalan Panglima Sudirman dan Jalan Jaksa Agung Suprpto menjadi salah satu faktor terjadinya kemacetan (sumber <https://radarlamongan.jawapos.com/berita-utama/2286032539/jlu-lamongan-tak-kunjung-dibuka-perlintasan-ka-rusak-tak-kunjung-diperbaiki>)

Selama bertahun-tahun, kemacetan lalu lintas mengular di sekitar perlintasan kereta api di sisi timur, dari depan Stadion Surajaya di Lamongan hingga sisi barat Terminal Lamongan. Situasi ini diperparah dengan seringnya kecelakaan yang melibatkan sepeda motor tergelincir di perlintasan kereta api selama musim hujan. (dikutip dari <https://surabaya.tribunnews.com/2025/04/14/lamongan-terkepung-kemacetan-sepanjang-jalan-pangsud-jakgung-suprpto-ini-alasan-jlu-belum-dibuka-pada-tanggal-29-oktober-2025>)

Berdasarkan fenomena ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Lamongan kemudian menetapkan kebijakan untuk membangun Jalan Lingkar Utara Lamongan. Kebijakan ini tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2011-2016 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan

tahun 2020-2039 (dikutip dari tinjauan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Lamongan tahun 2011-2016 pada tanggal 29 Oktober 2025).



Jalan Lingkar Utara (JLU) Lamongan merupakan proyek infrastruktur strategis yang membentang di sepanjang sisi utara Jalan Nasional, menghubungkan berbagai wilayah di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Pembangunan jalan ini bertujuan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan mengurangi kemacetan lalu lintas di pusat kota Lamongan. Dengan anggaran sebesar Rp50 miliar, Jalan Lingkar Utara direncanakan sepanjang 7,15 km. Pembangunan Jalan Lingkar Utara ini memiliki banyak tujuan, termasuk mengurangi kemacetan di pusat kota, yaitu Jalan Panglima Sudirman dan Jalan Jaksa Agung Suprpto. Pengalihan lalu lintas dari pusat kota Lamongan ke Jalan Lingkar Utara akan mengurangi kemacetan, terutama pada jam sibuk. Jalan Lingkar Utara akan mengalihkan kendaraan berat seperti truk dan bus, sehingga memperlancar lalu lintas di pusat kota. Jalan ini memperlancar konektivitas antara kawasan industri, pelabuhan, dan kawasan permukiman. Beberapa wilayah yang akan diuntungkan termasuk kecamatan-kecamatan di wilayah utara dan barat Kabupaten Lamongan. (dikutip dari <https://sabdanews.com/jalan-lingkar-utara-lamongan-akses-vital-untuk-mobilitas-dan-ekonomi-wilayah/> dikutip pada tanggal 29 Oktober 2025)

Implementasi kebijakan ini kemudian diwujudkan dengan dimulainya pembangunan Jalan Lingkar Utara Lamongan pada tahun 2023. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Lamongan, Sugeng Widodo, pembangunan dimulai pada ruas jalan yang menghubungkan Desa Plosowahyu dan Desa Sidokumpul di Kabupaten Lamongan. (dikutip dari <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7059324/jalan-lingkar-utara-lamongan-mulai-dibangun> dikutip pada 29 Oktober 2025)

Pembangunan Jalan Lingkar Utama terus berlanjut, dengan proyek Jalan Lintas Utara yang dijadwalkan pada tahun 2024. Kedua jembatan tersebut akan membentang dari Desa Plosowahyu, Kabupaten Lamongan, hingga Kecamatan Sidokumpul, Kabupaten Lamongan. Kedua jembatan, masing-masing sepanjang 40 meter, terletak di Desa Balun. Jembatan lainnya sepanjang 45 meter terletak di Kecamatan Sidokumpul. Selain itu, pembangunan jalan terus berlanjut, termasuk pembangunan jembatan yang melintasi Sungai Deket. (dikutip dari <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7341687/ada-proyek-jlu-jalur-deket-karangbinangun-ditutup-hingga-dialihkan> pada tanggal 29 Oktober 2025)

Proses pembangunan Jalan Lintas Pulau Utara Lamongan terus dilakukan hingga Maret 2025, dengan progres konstruksi mencapai 92 persen (dikutip dari <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7809061/jalan-lingkar-utara-lamongan-rampung-92-bisa-dipakai-mudik> pada tanggal 29 Oktober 2025)



Sumber (<https://www.detik.com/jatim/berita/d-7809061/jalan-lingkar-utara-lamongan-rampung-92-bisa-dipakai-mudik> on dikutip pada tanggal 29 Oktober 2025)



(Sumber: <https://beritajatim.com/pengerjaan-jlu-lamongan-ngebut-kejar-momen-mudik-lebaran> dikutip pada 29 Oktober 2025)

Dalam proses pelaksanaan pembangunan Jalan Lingkar Utama, Tim Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali melakukan inspeksi kondisi Jalan Lingkar Utara (JLU) Lamongan. Hal ini dilakukan untuk memastikan jalan yang baru selesai dibangun tersebut layak untuk arus mudik. Menurut Kepala Satuan Kerja (Kasatker) BBPJN Wilayah IV Jawa Timur - Bali, Bagus Artamana, JLU Lamongan sudah siap untuk lalu lintas kendaraan dari segi konstruksi. Namun, secara administratif masih terdapat hal yang belum siap, yaitu hasil uji laik fungsi jalan. Artamana menambahkan, Uji kelayakan ini merupakan wujud implementasi UU 22 Tahun 2009. Bahwa, pembangunan jalan baru sebelum dibuka harus melalui uji kelayakan (dikutip dari <https://www.ngopibareng.id/read/bbpjn-jatim-bali-cek-kesiapan-jlu-lamongan-dibuka-atau-tidak-tunggu-jawaban-dua-hari-lagi> pada 29 Oktober 2025).



(Tahap Uji Kelayakan Jalan Lintas Lamongan Utara yang dilaksanakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali (Sumber: <https://www.ngopibareng.id/read/bbpjn-jatim-bali-cek-kesiapan-jlu-lamongan-dibuka-atau-tidak-tunggu-jawaban-dua-hari-lagi> dikutip pada 29 Oktober 2025)

Pembangunan Jalan Lintas Pulau Lamongan Utara telah rampung dan diresmikan pada 17 Agustus 2025 oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi. Setelah peresmian, tahap selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, adalah uji kelayakan selama satu bulan (Sumber: <https://jatimnow.com/baca-78334-jlu-lamongan-resmi-dibuka-bupati-kebangkitan-ekonomi-baru>, dikutip 29 Oktober 2025).

Menurut Muhadi Setyo Utomo, pengawas lapangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBPJS) Jawa Timur-Bali, uji kelayakan ini bertujuan untuk memantau arus kendaraan, terutama di persimpangan dan titik masuk-keluar. Upaya ini bertujuan untuk meminimalkan potensi kecelakaan dan menjamin kenyamanan pengguna jalan. Selain itu, JLU ini akan menjadi jalur alternatif penting yang menghubungkan Lamongan dan Gresik. Upaya ini juga bertujuan untuk

meminimalkan potensi kecelakaan dan menjamin kenyamanan pengguna jalan (dikutip dari <https://jatim.antaranews.com/berita/958973/bbpjn-jatim-bali-segera-uji-coba-operasional-jlu-lamongan> pada 29 Oktober 2025).

Selama tahap uji kelayakan jalan, beberapa fenomena muncul, menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan kebijakan Jalan Lintas Utara Lamongan. Fenomena tersebut adalah tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Lintas Utara Lamongan selama uji laik jalan.

Salah satu fenomena yang muncul adalah Jalan Lingkar Utara (JLU) di Lamongan, Jawa Timur (Jatim), yang dibuka untuk uji coba sejak 17 Agustus 2025, yang saat ini menarik perhatian publik. Hal ini karena jalan sepanjang 6,7 kilometer itu disebut-sebut rawan kecelakaan, terutama di titik-titik putar balik yang dianggap membahayakan pengendara. Sejumlah pendengar Radio Suara Surabaya (SS) melaporkan kecelakaan di rute tersebut, salah satunya adalah Sidik. menilai bahwa selain masalah penerangan jalan, desain putar balik di JLU terlalu tajam. Bukan untuk mereka yang ingin putar balik, tetapi untuk pengendara dari arah berlawanan. Dia menyarankan agar ada solusi jangka panjang dan jangka pendek untuk mengantisipasi kecelakaan. Solusi jangka pendek adalah penambahan rambu dan penerangan sementara. Kemudian, jangka panjang adalah desain ulang, terutama di titik putar balik. Dia mencontohkan putar balik di Bypass Krian, yang dianggap lebih aman. (dikutip dari <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2025/jlu-lamongan-banyak-dikeluhkan-pendengaran-ss-rawan-kecelakaan-bbpjn-akan-evaluasi/> dikutip pada 29 Oktober 2025).

Fenomena lain yang muncul saat uji laik jalan Jalan Lintas Pulau Lamongan Utara adalah ratusan warga Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, memblokade Jalan Lintas Pulau Lamongan Utara. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap seringnya kecelakaan lalu lintas di jalan tersebut, yang telah menelan banyak korban jiwa. Jalan Lintas Pulau Lamongan Utara yang baru saja diresmikan pada 17 Agustus lalu telah menelan empat korban jiwa, satu di antaranya meninggal dunia di tempat kejadian. Mohamad Solih, warga Desa Balun, mengatakan minimnya rambu lalu lintas dan minimnya penerangan jalan menjadi penyebab utama seringnya kecelakaan tersebut. Sebelumnya, warga sudah beberapa kali menyampaikan pengaduan kepada instansi terkait, namun belum mendapat respons dan tindakan nyata.



(Sumber: dikutip dari <https://rri.co.id/daerah/1835456/ratusan-warga-lamongan-tutup-jlu-akibat-banyaknya-kecelakaan-pada-tanggal-29-oktober-2025>)

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lamongan, Dianto Hari Wibowo, setelah bermediasi dengan warga, mengumumkan bahwa pihaknya akan menutup sementara Jalan Lintas Utara dan mengalihkan lalu lintas ke jalur tengah sebagai langkah awal.

Protes terhadap uji kelayakan Jalan Lintas Utara Lamongan juga muncul di beberapa akun Facebook komunitas Lamongan di tengah penutupan sementara tersebut.

Berpijak pada dinamika fenomena yang muncul dari fase uji laik jalan, peneliti tertarik untuk mengkaji dinamika permasalahan ini melalui meso-studi analisis kebijakan uji laik jalan dan implementasi Jalan Lintas Utara Lamongan.

Dari perspektif studi penelitian Jalan Lintas Utara Lamongan, beberapa studi telah dilakukan, tetapi studi-studi tersebut berfokus pada studi dampak lingkungan yang dilakukan oleh Alvina Jana Vian Duri dkk. pada tahun 2024. Studi tersebut berjudul "Analisis Dampak Lingkungan Pembangunan Jalan Lintas Utara Lamongan." Penelitian ini berfokus pada deskripsi tahapan-tahapan analisis dampak lingkungan. Penelitian selanjutnya mengenai Jalan Lingkar Utara dilakukan oleh Syarifah Ulfah dengan judul "Analisis Kinerja Perbaikan Tanah Lunak dengan Drainase Vertikal Pracetak (PVD) Berbasis Data Lempeng Penurunan: Studi Kasus:

Proyek Jalan Lingkar Utara (JLU) Lamongan dari Stasiun 2+250 hingga Stasiun 6+767." Penelitian ini berfokus pada analisis tanah lunak.

Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada deskripsi jenis kebijakan uji kelayakan jalan untuk Jalan Lingkar Lamongan Utara dan meso-analisis kebijakan uji kelayakan jalan untuk pembangunan Jalan Lingkar Lamongan Utara dari perspektif kebijakan publik. Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kebijakan Uji Kelayakan Jalan untuk Pembangunan Jalan Lingkar Lamongan Utara."

Melalui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa jenis Kebijakan Uji Coba Kelayakan Pembangunan Jalan Lintas Utara Lamongan
2. Bagaimana Kebijakan Uji Coba Kelayakan Pembangunan Jalan Lintas Utara Lamongan jika dikaji dari kajian studi meso analisis kebijakan publik?

B. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka dengan menggunakan metode penelitian naratif, dengan teknik pengumpulan data melibatkan berita pada situs web dan platform media sosial warga Lamongan. Menurut Zeid (2008), metode kajian pustaka merupakan serangkaian kegiatan penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, pembacaan, pencatatan, dan pengolahan bahan penelitian dari berbagai sumber pustaka. Sementara itu, menurut Clandinin dan Coneley (2000), penelitian naratif berfokus pada pengalaman manusia yang diceritakan dalam bentuk narasi, menganalisis struktur, konteks, dan makna cerita. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah mesoanalisis. Menurut Parsons (2005, hlm. 87), mesoanalisis (berasal dari kata Yunani mesos, yang berarti tengah atau perantara) adalah analisis tingkat menengah atau analisis perantara yang menekankan hubungan antara definisi masalah, penetapan agenda, dan proses pengambilan keputusan serta implementasinya. Analisis Kebijakan Meso juga merupakan metode yang berupaya mengkaji dan memperdalam pemahaman tentang proses yang dilalui para pembuat kebijakan, dengan fokus utama pada bagaimana opini publik dan media massa berinteraksi dengan para pembuat kebijakan untuk menentukan agenda dan isu (Parsons, 2005, hlm. 88). Pendekatan selanjutnya mengkaji bagaimana isu dan agenda terbentuk dalam lingkungan kelembagaan: bagaimana partai, kelompok kepentingan, dan pembuat kebijakan berinteraksi untuk menentukan apa yang dianggap sebagai isu politik dan apa yang bukan (Parsons, 2005, hlm. 88).

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam makalah ini menggunakan metode tinjauan naratif, dengan menghimpun berbagai sumber dan data terkait topik penelitian (Wiles, Crow & Pain, 2011, dikutip dalam Parsons 2005). Sumber yang digunakan adalah jurnal dan laporan media nasional dan internasional terdahulu yang menyajikan data tentang pembangunan jalan tol Lamongan utara dan proses uji cobanya. Data jurnalistik juga dianalisis (Wiles, Crow & Pain, 2011, dikutip dalam Parsons 2005). Data tersebut kemudian disajikan secara naratif, membentuk informasi terintegrasi yang dapat menyoroti aspek-aspek kunci topik serta aspek historis yang penting untuk memahami kausalitas suatu kebijakan. Metode tinjauan naratif ini menawarkan solusi yang mempertimbangkan semua elemen yang membentuk sebuah narasi (Ferrari, 2015, dikutip dalam Parsons 2005).

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis meso kebijakan dimana Menurut Parsons (2005, hlm. 87) Analisis meso (berasal dari kata Yunani, mesos, yang berarti tengah, atau perantara) merupakan analisis tingkat menengah atau analisis perantara yang menekankan hubungan antara pendefinisian masalah, penetapan agenda, dan proses pengambilan keputusan serta implementasinya. Analisis Kebijakan Meso juga merupakan metode yang berupaya untuk mengkaji dan memperdalam pemahaman tentang proses yang dilalui oleh para pembuat kebijakan dengan fokus utamanya pada bagaimana opini publik dan media massa berinteraksi dengan para pembuat kebijakan untuk menentukan agenda dan masalah (Parsons, 2005, hlm. 88). Pendekatan selanjutnya mengkaji bagaimana isu dan agenda terbentuk dalam lingkungan kelembagaan: bagaimana partai, kelompok kepentingan, dan pembuat kebijakan berinteraksi untuk menentukan apa yang dianggap sebagai isu politik dan apa yang bukan (Parsons, 2005, hlm. 88).

C. Hasil dan Pembahasan

Jenis Kebijakan Uji Kelayakan Pembangunan Jalan Lintas Pulau Lamongan Utara

Kebijakan Pembangunan Jalan Lintas Pulau Lamongan Utara dan uji kelayakannya merupakan fenomena menarik dalam studi kebijakan di Indonesia. Kebijakan ini disusun untuk mengurai kemacetan parah yang hampir setiap hari terjadi di Jalan Nasional yang melintasi dua perlintasan kereta api Lamongan. Jalan Lintas Pulau Utama Lamongan, yang dibangun untuk mengurangi kemacetan, merupakan proyek strategis nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kehadiran infrastruktur baru ini diharapkan tidak hanya mengurai kemacetan akibat perlintasan ganda kereta api, tetapi juga mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru di Lamongan.

Pembangunan jalan dengan anggaran Rp50 miliar ini memiliki panjang 7,15 kilometer dan menghubungkan Desa Rejosari, Kecamatan Deket, hingga Desa Plosowahyu, Kabupaten Lamongan. Proyek ini diperkirakan selesai pada akhir Februari 2025. Jalan Lingkar Utara akan berfungsi sebagai jalur alternatif bagi kendaraan yang melintasi Lamongan, mengurangi kemacetan lalu lintas di pusat kota, dan memperlancar transportasi. (Dikutip dari <https://www.kompasiana.com/tanniaizzati8898/67b5de77c925c4582b4d2772/pembangunan-jalan-lingkar-utara-lamongan-mendorong-perkembangan-ekonomi-dan-solusi-mengurai-kemacetan-pada-29-oktober-2025>)

Pembangunan Jalan Lingkar Utama Lamongan merupakan wujud implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Undang-undang ini mengatur beberapa perubahan dan penambahan ketentuan terkait pengelolaan jalan, termasuk kewenangan, data dan informasi jalan, serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan jalan. Dilihat dari rincian kebijakan pembangunan Jalan Lintas Utara Lamongan di atas, menurut penulis, Kebijakan Pembangunan Jalan Lintas Utara Lamongan merupakan salah satu bentuk kebijakan transportasi. Menurut Tarmin (2000), kebijakan transportasi adalah upaya pemerintah untuk menyediakan sistem transportasi yang efisien melalui pengaturan pasokan dan permintaan transportasi, pembangunan infrastruktur, dan manajemen lalu lintas.

Dalam masa konstruksi dan implementasinya, Jalan Raya Lamongan Utara akan menjalani masa uji coba selama satu bulan, mulai 17 Agustus hingga 17 September 2025. Menurut Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali, masa uji coba ini merupakan bagian krusial dari fase operasional jalan baru tersebut. Masa uji coba ini dimaksudkan untuk menguji kelancaran lalu lintas dan mengevaluasi fitur keselamatan sebelum dibuka untuk umum. (<https://jatim.suaramerdeka.com/jatim/108815799008/uji-coba-jalan-lingkar-utara-lamongan-sampai-17-september-2025> dikutip [ada tanggal; 29 Oktober 2025])

Mengacu pada tahapan yang telah dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) di atas, masa uji coba, dari perspektif kajian kebijakan publik, merupakan perwujudan penerapan analisis kelayakan kebijakan transportasi. Pendekatan uji coba kelayakan merupakan proses kebijakan publik yang menekankan analisis implementasi kebijakan dalam skala terbatas untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampaknya sebelum diimplementasikan dalam jangka panjang. Tujuan uji coba kebijakan adalah untuk meminimalkan risiko kegagalan kebijakan dan memperoleh bukti empiris yang dapat dijadikan dasar perbaikan kebijakan pada tahap selanjutnya. Lebih lanjut, model kebijakan uji coba Jalan Lintas Batas Negara Lamongan Utara merupakan bentuk desain kebijakan eksperimental, dimana kebijakan uji coba Jalan Lintas Batas Negara Lamongan Utara diuji secara sistematis melalui observasi, evaluasi, dan penyesuaian sebelum diimplementasikan secara penuh.

Analisis Meso Kebijakan Uji Kelayakan Pembangunan Jalan Lintas Pulau Lamongan Utara

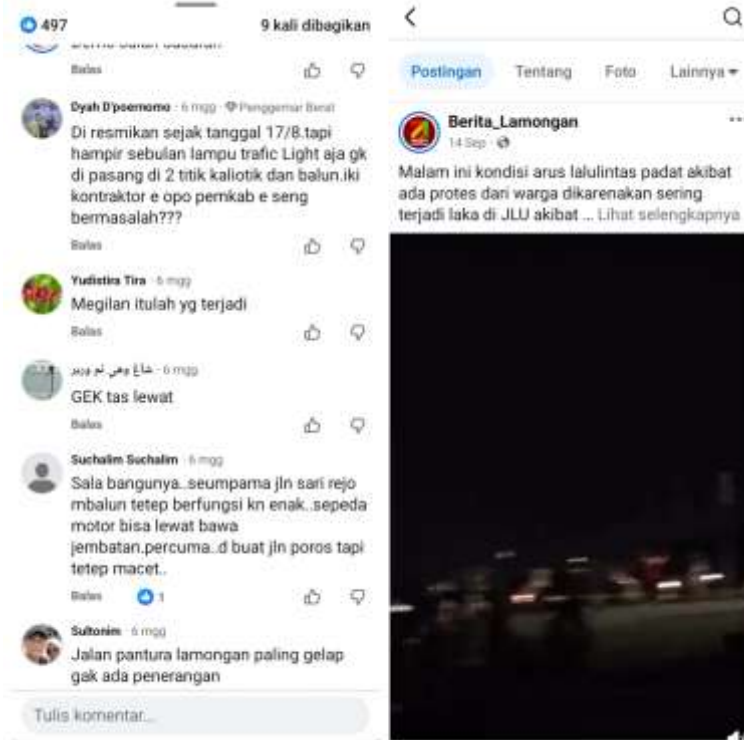
Uji coba kebijakan Jalan Lintas Pulau Utara Lamongan akan dilaksanakan mulai 17 Agustus 2025 hingga 17 September 2025. Uji coba ini bertujuan untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dalam kebijakan pembangunan Jalan Lintas Pulau Utara Lamongan.

Selama pelaksanaannya, uji coba Jalan Lintas Pulau Utara Lamongan telah menghadapi berbagai tantangan, termasuk banyaknya kecelakaan. Kecelakaan-kecelakaan ini telah merenggut banyak nyawa. Jalan Lintas Pulau Utara, yang baru saja diresmikan pada 17 Agustus, telah merenggut empat nyawa. Bahkan, satu orang meninggal dunia di lokasi kejadian. (Sumber: dikutip dari <https://rri.co.id/daerah/1835456/ratusan-warga-lamongan-tutup-jlu-akibat-banyaknya-kecelakaan-pada-29-oktober-2025>)

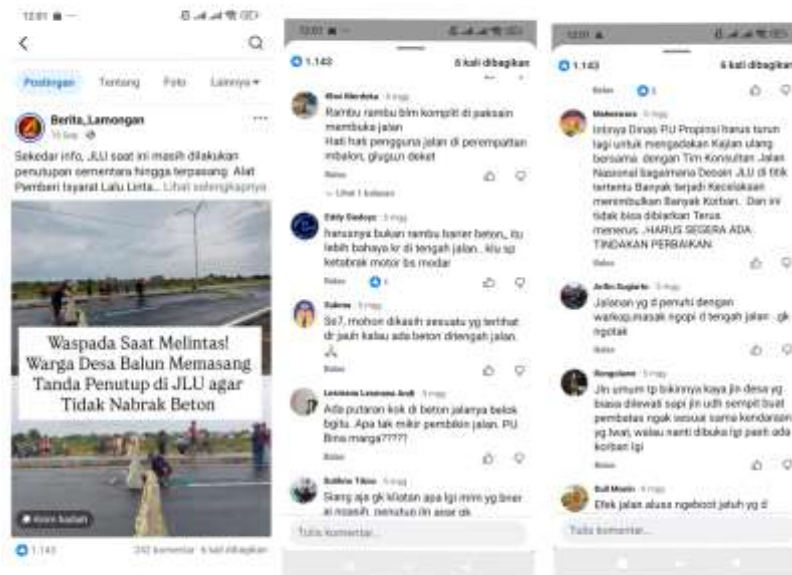
Akibat banyaknya kecelakaan selama uji coba jalan lintas utara Lamongan, ratusan warga Desa Balun, Kecamatan Turi, Lamongan, turun ke jalan untuk memblokade simpang Jalan Lingkar Utara (JLU) Balun pada 14 September 2025.

Masyarakat setempat menuntut agar pemerintah daerah segera memasang lampu lalu lintas di lokasi tersebut. Menurut warga setempat, jalur yang banyak dilalui kendaraan berat ini sangat rawan kecelakaan serta sering terjadinya kecelakaan. (Sumber: dikutip dari <https://rri.co.id/daerah/1835456/ratusan-warga-lamongan-tutup-jlu-akibat-banyaknya-kecelakaan-pada-29-Oktober-2025>)

Peristiwa masyarakat Balun turun ke jalan untuk memblokade jalan agar pembangunan jalan lintas utara Lamongan bisa disempurnakan juga mendapat tanggapan dari masyarakat Lamongan yang memberikan komentar di media sosial masyarakat Lamongan.



(sumber: akun facebook berita_lamongan dikutip pada tanggal 29 Oktober 2025)



(sumber: akun facebook berita lamongan dikutip pada tanggal 29 Oktober 2025)

Fenomena ini juga menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan. Komisi C, Mahfud Shodiq, menyampaikan keprihatinannya mengingat banyaknya kekurangan fasilitas pendukung yang perlu segera diperbaiki agar jalur alternatif tersebut benar-benar aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah minimnya lampu lalu lintas di beberapa persimpangan. Menurut Mahfud, idealnya terdapat lima lampu lalu lintas di sepanjang jalur tersebut, namun yang terpasang hanya tiga. Lebih lanjut, Komisi C juga menyoroti minimnya penerangan jalan. Kondisi ini dinilai membahayakan, terutama bagi pengendara sepeda motor. (Sumber: <https://radarlamongan.jawapos.com/berita-utama/2286465193/dprd-soroti-jlu-lamongan-minim-traffic-light-dan-lampu-jalan-dinilai-rawan-kecelakaan> dikutip pada 29 Oktober 2025)



(Sumber: <https://radarlamongan.jawapos.com/berita-utama/2286465193/dprd-soroti-jlu-lamongan-minim-traffic-light-dan-lampu-jalan-dinilai-rawan-kecelakaan> dikutip pada tanggal 29 Oktober 2025)

Menanggapi hal tersebut, instansi terkait segera menanggapi tuntutan masyarakat dan masukan dari anggota Komisi C DPRD. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lamongan, Dianto Hari Wibowo, melakukan mediasi dengan warga dan menyatakan bahwa pihaknya akan menutup sementara Jalan Lintas Utara dan mengalihkan arus lalu lintas ke jalur tengah sebagai langkah awal penanganan permasalahan yang menjadi tuntutan warga sekitar (sumber: <https://rri.co.id/daerah/1835456/ratusan-warga-lamongan-tutup-jlu-akibat-banyaknya-kecelakaan> dikutip pada 29 Oktober 2025).

Fenomena banyaknya kecelakaan dan tuntutan masyarakat akan perbaikan Jalan Lintas Utara dengan penambahan lampu lalu lintas merupakan manifestasi dari level meso-policy, sebagaimana dikemukakan Blummer. Meso-policy merupakan tahap pendefinisian masalah ketika masyarakat turun ke jalan untuk menuntut penutupan sementara Jalan Lintas Lamongan. Pada tahap penjarangan, Kepala Dinas Perhubungan Lamongan Dianto Hari Wibowo melakukan mediasi dengan warga dan mengumumkan bahwa pihaknya akan menutup sementara Jalan Lintas Utara dan mengalihkan arus lalu lintas ke jalur tengah sebagai langkah awal penanganan situasi tersebut.

Dalam proses pengambilan keputusan, terlihat dari pernyataan Komisi C DPRD Lamongan, Mahfud Shodiq, yang memberikan masukan untuk menambah dua lampu lalu lintas di dua simpang lokasi rawan kecelakaan, dari tiga lampu lalu lintas menjadi lima lampu lalu lintas. Melihat fenomena tersebut, para pengambil kebijakan, yaitu Mahfud Shodiq selaku perwakilan Komisi C DPRD dan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lamongan, Dianto Hari Wibowo, yang melakukan mediasi dengan warga dalam tahap analisis kebijakan meso, mencoba memahami bagaimana opini publik dan media massa berinteraksi dengan para pengambil kebijakan untuk menentukan agenda dan permasalahan perbaikan pembangunan Jalan Lintas Utara Lamongan. Fenomena Komisi C DPRD Lamongan dan Dinas Perhubungan Lamongan yang menanggapi tuntutan warga juga merupakan manifestasi dari analisis meso Wayne Parson tentang bagaimana para pihak, kelompok kepentingan, dan para pengambil kebijakan berinteraksi untuk menentukan apa yang dianggap sebagai isu dan apa yang bukan.

Dinamika opini masyarakat Lamongan terkait tuntutan penutupan jalan lintas Lamongan utara untuk diperbaiki sebagaimana ditunjukkan oleh data penulis dari sudut pandang penulis, Menurut Blummer, permasalahan tersebut bukan hanya realitas objektif tetapi merupakan produk opini kolektif dimana permasalahan perlunya perbaikan Jalan Lintas Lamongan Utara terbentuk dalam pembentukan perspektif dan didefinisikan dalam masyarakat melalui opini

mereka di media sosial. Selain itu, menurut Mauss (1975, dalam Parson 2005), permasalahan sosial penolakan masyarakat Balun untuk memblokade jalan lintas Lamongan utara agar ditutup sementara untuk perbaikan pada dasarnya sebagaimana yang dikemukakan Mauss, blokade ini merupakan gerakan sosial yang dihasilkan dari perilaku publik masyarakat setempat, kelompok kepentingan atau kelompok penekan.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan pembangunan jalan lintas utara merupakan salah satu bentuk kebijakan transportasi. Pertama, dilihat dari rincian kebijakan pembangunan jalan lintas utara Lamongan di atas, menurut penulis, Kebijakan Pembangunan Jalan Lintas Utara Lamongan merupakan salah satu bentuk kebijakan transportasi. Menurut Tarmin (2000), kebijakan transportasi merupakan upaya pemerintah untuk menyediakan sistem transportasi yang efisien melalui pengaturan penawaran dan permintaan transportasi, pembangunan infrastruktur, dan manajemen lalu lintas.

Kedua, dalam proses pengembangan dan implementasinya, kebijakan jalan lintas utara yang Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) Jawa Timur-Bali melaksanakan uji coba selama satu bulan, menunjukkan bahwa Kebijakan Transportasi Pembangunan Jalan Lintas Utara Lamongan merupakan salah satu bentuk metode analisis kebijakan uji coba kelayakan dalam studi kebijakan transportasi, atau Model Uji Coba Kebijakan. Sebagaimana dikemukakan Dunn (2018), metode uji coba kebijakan yang diterapkan BBPJJN Jawa Timur-Bali merupakan suatu pendekatan dalam proses kebijakan publik yang menekankan implementasi kebijakan dalam skala terbatas terlebih dahulu untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampaknya sebelum diimplementasikan dalam jangka panjang. Tujuan uji coba kebijakan adalah untuk meminimalkan risiko kegagalan kebijakan dan memperoleh bukti empiris yang dapat dijadikan dasar perbaikan kebijakan pada tahap selanjutnya.

Ketiga, proses penyempurnaan kebijakan transportasi yang diawali dengan protes masyarakat yang memblokade Jalan Lintas Utara Lamongan sehingga terjadi penutupan dan perbaikan lampu lalu lintas. Tanggapan mediasi dari Dinas Perhubungan yang diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan Dianto Hariwibiwo dan Komisi C yang diwakili oleh Mahfud Shidiq memberikan masukan. Hal ini merupakan bentuk implementasi meso-kebijakan pada level menengah. Para pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan berupaya memahami bagaimana opini publik dan media massa berinteraksi dengan para pembuat kebijakan untuk menentukan agenda dan isu-isu perbaikan pembangunan Jalan Lintas Utara Lamongan. Lebih jauh, respon terhadap penutupan Jalan Lintas Utara Lamongan dan penambahan lampu lalu lintas merupakan pendekatan konstruktivisme, di mana penyempurnaan kebijakan dilakukan melalui konstruktivisme masyarakat di media sosial. Menurut Blummer, permasalahan tersebut bukan sekadar realitas objektif melainkan produk opini kolektif. Permasalahan perlunya perbaikan Jalan Lintas Utara Lamongan dibentuk melalui perspektif dan didefinisikan dalam masyarakat melalui opini mereka di media sosial. Lebih jauh, menurut Mauss, permasalahan Gerakan sosial masyarakat Balun untuk memblokade jalan lintas utara Lamongan agar ditutup sementara untuk perbaikan pada dasarnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Mauss, blokade ini merupakan gerakan sosial yang diakibatkan oleh perilaku publik masyarakat setempat, kelompok kepentingan atau kelompok penekan.

E. Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2005). Badan Pusat Statistik 2004. Jakarta: BPS.
- Clandinin, D. J., & Connelly, F. M. (2000). *Narrative inquiry: Experience and story in qualitative research*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
dikutip pada 29 Oktober 2025
- Dunn, W. N. (2018). *Analisis Kebijakan Publik: Pendekatan Terpadu*. Routledge.
<https://beritajatim.com/pengerjaan-jlu-lamongan-ngebut-kejar-momen-mudik-lebaran>
<https://jatim.antaranews.com/berita/958973/bbpjn-jatim-bali-segera-uji-coba-operasional-jlu-lamongan> pada 29 Oktober 2025
<https://jatimnow.com/baca-78334-jlu-lamongan-resmi-dibuka-bupati-kebangkitan-ekonomi-baru> dikutip pada 29 Oktober 2025
<https://radarlamongan.jawapos.com/berita-utama/2286032539/jlu-lamongan-tak-kunjung-dibuka-perlintasan-ka-rusak-tak-kunjung-diperbaiki> dikutip pada 29 Oktober 2025

- <https://rri.co.id/daerah/1835456/ratusan-warga-lamongan-tutup-jlu-akibat-banyaknya-kecelakaan-dikutip-pada-29-oktober-2025>
- <https://sabdanews.com/jalan-lingkar-utara-lamongan-akses-vital-untuk-mobilitas-dan-cantumkanekonomi-wilayah/> dikutip pada 29 Oktober 2025
- <https://surabaya.tribunnews.com/2025/04/14/lamongan-terkepung-kemacetan-sepanjang-jalan-pangsud-jakgung-suprpto-ini-alasan-jlu-belum-dibuka> dikutip pada 29 Oktober 2025
- <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7059324/jalan-lingkar-utara-lamongan-mulai-dibangun> dikutip pada 29 Oktober 2025
- <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7059324/jalan-lingkar-utara-lamongan-mulai-dibangun> dikutip pada 29 Oktober 2025
- <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7341687/ada-proyek-jlu-jalur-deket-karangbinangun-ditutup-hingga-dialihkan> dikutip pada 29 Oktober 2025
- <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7809061/jalan-lingkar-utara-lamongan-rampung-92-bisa-dipakai-mudik> dikutip pada 29 Oktober 2025
- <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7809061/jalan-lingkar-utara-lamongan-rampung-92-bisa-dipakai-mudik> dikutip pada 29 Oktober 2025
- <https://www.ngopibareng.id/read/bbpjn-jatim-bali-cek-kesiapan-jlu-lamongan-dibuka-atau-tidak-tunggu-jawaban-dua-hari-lagi> dikutip pada 29 Oktober 2025
- <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2025/jlu-lamongan-banyak-dikeluhkan-pendengaran-ss-rawan-kecelakaan-bbpjn-akan-evaluasi/> dikutip pada 29 Oktober 2025
- Marwiyah, Siti. (2022). *Administrasi Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Eksekusi, Analisis, dan Evaluasi Kebijakan Publik*. CV MITRA ILMU
- Parsons, Wayne. 2005. *Kebijakan Publik: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Brenada Media
- Tamin, Ofyar Z. (2000). *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Tinjauan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Lamongan 2011-2016
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.